

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini upaya Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan perundang-undangan, yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta arah kebijakan umum maupun khusus lainnya, hingga didorongnya pengelolaan keuangan desa pada peningkatan kualitas dengan membangun kompetisi intern dan atau antar kelembagaan desa.

Perubahan paradigma pemerintahan desa yang berorientasi pada otonomi daerah atau yang disebut dengan pembangunan desentralistik, merupakan bagian dari upaya untuk tetap bertahan di era globalisasi. Paradigma baru tersebut pada hakekatnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang kian beragam karena perbedaan historis dan geografis masing-masing wilayah.

Ada beberapa target yang ingin dicapai dalam kebijaksanaan desentralisasi desa tersebut. Pertama sistim pemerintahan desa harus lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, aparat dan lembaga kantor desa. Kedua iklim pemerintahan harus mewujudkan kualitas interaksi pelayanan publik. Sehingga dengan demikian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus kontinu dilakukan, baik secara konvensional maupun inovatif.

Pelayanan Publik merupakan kewajiban dan tugas yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah. Melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan (aspirasi) publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, Taufiq Effendi (2006:33).

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan murah sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Untuk memperkuat hal diatas telah diatur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, bahwa pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan Standart pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Namun dalam penelitian kali ini peneliti akan mengungkap proses pelayanan publik dalam prespektif pendekatan ekonomi politik kebijakannya. Menurut Caporaso & Levin dalam Yustika (2013:101), ilmu ekonomi dan

ilmu politik memang berlainan, dimana keduanya mempunyai alat analisis yang berbeda dan bahkan asumsi yang bellawanan. Tentunya tidak mungkin untuk menggabungkan alat analisis ekonomi dan politik. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik (yang terbatas) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan aspek sosial (masyarakat) yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan teori tersebut pelayanan publik adalah subyek yang akan menjadi bahan penelitian kali ini. Dimana pelayanan merupakan sumber daya yang dimanfaatkan oleh aparatur/perangkat desa untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan publik mendapatkan kerugian dan hanya menjadi sasaran dalam kebijakan/tindakannya.

Dengan penjelasan diatas, peneliti mengambil lokasi yang akan di jadikan subyek penelitian yaitu Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, yang didalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur desa dengan jumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri atas Kepala Desa dan Aparatur/Perangkat Desa. Dalam pelayanan publik ini ada 2 bentuk pelayanan yang ada didesa Gendro yaitu pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi. Pelayanan administrasi yang terdapat di Desa Gendro yaitu terdapat pelayanan umum dan pelayanan penduduk. Sedangkan

pelayanan non administrasi terdapat pelayanan secara fisik dan non fisik, pelayanan fisik berupa pembangunan infrastruktur desa, pelayanan non fisik berupa pelayanan dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pernyataan diatas penelitian ini hanya mengambil fokus salah satu bentuk pelayanan yang ada, yaitu pelayanan administrasi. Adapun prosedur pelayanan administrasi meliputi prosedur dalam mengurus, surat kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat kematian, surat izin usaha, surat keterangan gaji orangtua, surat perpindahan penduduk, surat penduduk baru atau membuat KTP Penduduk baru.

Desa yang berada dilereng gunung bromo dengan tanah subur menjadikan kehidupan masyarakat desa tersebut bekerja sebagai petani, buruh tani, dan peternak sapi perah yang membuat masyarakat harus bekerja mulai pagi sampai sore yang menjadikan Kantor Desa ketika jam kerja berlangsung yaitu jam 08.00 sampai dengan 14.00.

Sehingga aparatur/perangkat desa yang mempunyai tugas dan wewenang masih sering melaksanakan pekerjaannya dirumahnya, dengan alasan ketika jam kerja jarang sekali masyarakat yang datang langsung ke kantor desa. Jika pelayanan dilakukan seperti itu, maka tugas perangkat ketika di kantor hanya menyalin data yang sudah diperoleh dari masyarakat untuk diketik dikomputer milik Desa dan menjadikan perangkat masuk/pulang kerja seenaknya sesuai keinginan mereka. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi resah karena mereka yang sudah menyempatkan waktu

untuk datang ke kantor desa kebanyakan tidak bisa ketemu dengan aparatur/perangkat yang menjabat sebagai KAUR UMUM.

Sebenarnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini memiliki azas-azas yang harus dijaga dan dilaksanakan, seperti yang di sampaikan oleh Effendi (2006:33), azas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: Kepastian hukum, Keterbukaan, Partisipatif, Akuntabilitas, Kepentingan umum, Profesionalisme, Kesamaan hak dan Keseimbangan hak dan kewajiban. Jika melihat pernyataan tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik di desa gendro oleh aparatur/perangkat yang menjabat Kaur Umum belum bisa melaksanakan azas-azas penyelenggaraan pelayanan publik. Karena semua unsur yang ada telah dikesampingkan dengan melaksanakan tugasnya di rumah bukan di kantor desa.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan *rent seeking* oleh perangkat desa dibidang KAUR UMUM Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “ **EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA GENDRO KECAMATAN TUKUR KABUPATEN PASURUAN** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelayanan publik di Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dilihat dari perspektif ekonomi politik kebijakandalam pendekatan *rational choice*?
2. Apa faktor pendorong & penghambat secara ekonomi dan politik didalam pelayanan publik di Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah yang diharapkan dari penelitian yang akan dillakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelayanan publik di Desa Gendro Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dalam perspektif ekonomi politik kebijakan.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat apa saja yang secara ekonmi dan politik didalam proses penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya yang terkait dengan teori ekonomi politik kebijakan dan pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Desa khususnya pada Desa Gendro Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan sebagai penyelenggara pelayanan pemerintahan Desa.